

**PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH DAN *LEVEL OF CAPITAL*
OUTLAY TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS***

(Studi Empiris Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat
Periode 2019-2023)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang*



Oleh

IRFAN NAZAR ALI

2018/18043018

Dosen Pembimbing

Fefri Indra Arza, SE, M.Sc.Ak

DEPARTEMEN AKUNTANSI

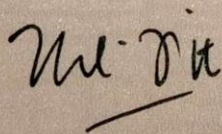
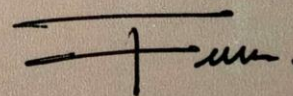
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH DAN *LEVEL OF CAPITAL OUTLAY*
TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS*****(Studi Empiris Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat
Periode 2019-2023)**

Nama : Irfan Nazar Ali
NIM/TM : 18043018 / 2018
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Juli 2025**Disetujui Oleh:****Kepala Departemen Akuntansi****Dr. Nelvirita, SE, M.Si, Ak****NIP. 19740706 199903 2 002****Pembimbing****Fefri Indra Arza, SE, M.Sc.Ak****NIP. 19730213 199903 1 003**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Kemandirian Daerah dan *Level of Capital Outlay* Terhadap *Financial Distress*: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Periode 2019-2023

Nama : Irfan Nazar Ali

NIM/TM : 18043018 / 2018

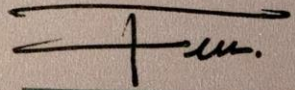
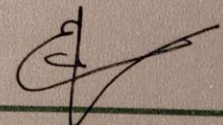
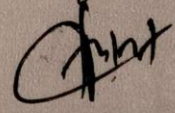
Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Juli 2025

Tim Penguji,

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc.Ak	1. 
2	Anggota	Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak	2. 
3	Anggota	Mayar Afriyenti, SE, M.Sc	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan Nazar Ali
 NIM/Tahun Masuk : 18043018/2018
 Tempat/Tgl. Lahir : Painan/ 24 Maret 2000
 Program Studi : Akuntansi
 Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 Alamat : Labuh Gajah, Sungai Tunu, Kec. Ranah Pesisir, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat
 No. HP/Telp : 082385325834
 Judul Skripsi : Pengaruh Kemandirian Daerah dan *Level of Capital Outlay* Terhadap *Financial Distress*: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Periode 2019-2023

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Juli 2025

Saya yang Menyatakan



Irfan Nazar Ali
 NIM.18043018/2018

ABSTRAK

Irfan Nazar Ali : Pengaruh Kemandirian Daerah dan *Level of Capital Outlay* Terhadap *Financial Distress*:
(2018/18043018) Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Periode 2019-2023

Dosen Pembimbing : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc.Ak

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh kemandirian keuangan daerah dan *level of capital outlay* terhadap *financial distress* pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat periode 2019-2023. *Financial distress* pada pemerintah daerah merupakan masalah penting karena mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik secara efektif. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 95 sampel. Analisis dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda dengan software SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap *financial distress*. Sementara itu, *level of capital outlay* juga berpengaruh positif signifikan terhadap *financial distress*.

Kata Kunci : *Financial Distress*, Kemandirian Keuangna Daerah, *Level of Capital Outlay*.

ABSTRACT

This research examines the influence of regional financial independence and the level of capital outlay on financial distress in district and city governments in West Sumatra for the 2019-2023 period. Financial distress in local governments is an important issue because it affects their ability to provide public services effectively. With a quantitative approach, this research uses secondary data from the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance. The sample was determined using a purposive sampling technique, and a sample of 95 samples was obtained. The analysis was carried out using multiple linear regression with SPSS version 26 software. The research results showed that regional financial independence had a significant positive effect on financial distress. Meanwhile, the level of capital outlay also has a significant positive effect on financial distress.

Keywords : *Financial Distress, Regional Financial Independence, Level of Capital Outlay.*

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kemandirian Daerah dan *Level of Capital Outlay* Terhadap *Financial Distress*: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Periode 2019-2023”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang diajukan untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan berbagai pihak yang berjasa memberikan bimbingan, semangat serta kritik dan saran. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc.Ak selaku pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak dan Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc selaku penguji, yang telah memberikan kritik dan sarannya untuk perbaikan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Ibu Ade Elsa Betavia, SE, M.Si dan Ibu Eka Fauzihardani, SE., M.Si.Ak selaku pembimbing akademik, yang telah membimbing penulis selama menjalani masa perkuliahan.

4. Ibu Dr. Nelvirita, SE, M.Si, Ak selaku Kepala Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang untuk semua kebijakan yang sudah ditetapkan.
5. Abang Rizki selaku admin prodi akuntansi yang sudah mempermudah segala urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teristimewa penulis ucapkan kepada orang tua (Ibu Rostina) tercinta, atas doa-doa baik yang tidak hentinya dikirimkan serta kasih sayang yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk selalu percaya setiap langkah yang penulis pilih dan memberikan keyakinan bahwa penulis mampu memberikan yang terbaik. Semoga lelah ibu dapat berbuah manis suatu hari nanti.
7. Teman-teman seperjuangan Tatatitutu (Aziza, Pio, Wandu, Reza, Hokage dan Kodim) yang sudah seperti keluarga kedua. Menjadi teman diskusi, tempat berbagi suka dan duka dan menemani dalam setiap perjalanan penulis dalam menyelesaikan masa-masa perkuliahan. Semoga kita bertemu di waktu selanjutnya dengan keadaan yang lebih baik.
8. Bang Rangga selaku pemilik kedai kopi Barscoot Coffee, terimakasih atas segala bantuan yang diberikan selama penulis menjalani proses yang penulis lalui dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Iqbal selaku pemilik bengkel Side Beach Garage beserta teman-teman semua lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala yang teman-teman berikan kepada penulis. Semoga segala impian teman-teman dapat segera diwujudkan oleh Allah SWT, Aamiin.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Kajian Teori.....	14
1. Teori Ketergantungan Sumber Daya	14
2. Keuangan Daerah	15
3. Laporan Keuangan Daerah	16
4. Financial Distress Pada Sektor Pemerintahan.....	16
5. Kemandirian Daerah.....	20
6. Level of Capital Outlay (LCO)	21
B. Penelitian Terdahulu	22
C. Pengembangan Hipotesis	24
D. Kerangka Konseptual.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Populasi dan Sampel	28
C. Jenis dan Sumber Data.....	29
D. Metode Pengumpulan Data	30
E. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	30
F. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Deskripsi Data	38

B. Statistik Deskriptif	43
C. Analisis Regresi Linear Berganda	45
1. Uji Asumsi Klasik	45
2. Uji Model.....	48
3. Pengujian Hipotesis	50
D. Pembahasan	52
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Implikasi Hasil Penelitian	57
C. Keterbatasan Penelitian.....	58
D. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Realisasi Belanja Modal Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2021	5
Tabel 2: Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3: Populasi dan Sampel	28
Tabel 4: Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat	38
Tabel 5: Nilai Rasio Kemandirian Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat	39
Tabel 6: Nilai Rasio LCO Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat	41
Tabel 7: Nilai Rasio Financial Distress Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat	42
Tabel 8: Deskriptif statistik variabel penelitian setelah data diolah	44
Tabel 9: Uji Normalitas.....	45
Tabel 10: Uji Multikolinearitas	46
Tabel 11: Uji Autokorelasi	47
Tabel 12: Uji Heterokedastisitas.....	48
Tabel 13: Uji Koefisien Determinasi	49
Tabel 14: Uji F (Simultan)	50
Tabel 15: Uji Hipotesis (Uji T)	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi keuangan dan otonomi daerah membawa perubahan dalam urusan pemerintahan yang diatur dalam UU No. Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah mengacu pada hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam wilayah administratifnya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, pemerintah daerah mempunyai otonomi sebesar-besarnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugasnya. Hak dan kewajiban pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk rencana aksi pemerintah daerah, dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan keuangan daerah, serta dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakikat otonomi daerah adalah kekuasaan administratif daerah yang lebih besar, termasuk pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah adalah aspek yang tak dapat dipisahkan dari pelaksanaan tugas pemerintahan dan menjadi tanggung jawab daerah karena adanya pelimpahan urusan pemerintahan (Fauzi, 2019).

Namun, dalam menata belanja birokrasi pada pemerintah daerah guna penyempurnaan undang-undang terkait hubungan keuangan antara pusat dan daerah memberikan nuansa baru pada pengelolaan belanja di daerah. Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) sebagai Pengganti Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU ini diharapkan mendorong kemandirian dan inovasi pendanaan belanja pemerintah daerah. Pada undang-undang tersebut diatur mengenai batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari APBD. Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini ditetapkan.

Kondisi seperti ini dihadapi oleh Provinsi Sumatera Barat yang memiliki 12 kabupaten dan 7 kota. Bersumber dari DAK di Provinsi Sumatera Barat porsi belanja pegawai terhadap total belanja APBD tahun 2019 sebesar 43,67 %, tahun 2020 sebesar 44,20 % melonjak tahun 2021 menjadi 46,28 %. Sedang belanja modal mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam periode yang sama tahun 2019 sebesar 51,65 %, tahun 2020 sebesar 44,54 % dan tahun 2021 menjadi 33,26 %. Kondisi ini diperparah lagi dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang relatif rendah (Padek.jawapos.com, 2022). Minimnya jumlah belanja modal yang

dikeluarkan maka daerah tersebut belum mampu berinvestasi dengan baik dalam setiap kegiatan pemerintahan yang bertujuan memberikan pelayanan yang terbaik untuk publik atau kesejahteraan masyarakat. Penyebab minimnya jumlah belanja modal yang dikeluarkan diantaranya karena belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai. Rendahnya rasio belanja modal menimbulkan kerugian publik. Karena belanja modal pada dasarnya digunakan untuk membangun sarana dan fasilitas publik. Kondisi seperti ini berpotensi menimbulkan kesulitan keuangan (Husniati *et al.*, 2016).

Memprediksi kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan sangatlah penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan diambilnya kebijakan untuk memperbaiki kondisi dan kinerja pemerintah daerah. Dengan tindakan antisipasi terhadap potensi kesulitan keuangan, kemungkinan besar dapat dihindari atau setidaknya mengurangi risiko kesulitan keuangan pada setiap pemerintah daerah (Wulandari *et al.*, 2018). Laporan keuangan dapat digunakan untuk memahami status keuangan pemerintah daerah. Ketika kondisi keuangan yang buruk akan mempersulit pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, termasuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dan melaksanakan berbagai program kegiatan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *financial distress* disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah untuk mendanai infrastruktur publik, yang merupakan bagian dari misi

pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (Rahmatika & Imron, 2022).

Financial distress dalam sektor publik adalah kurangnya kemampuan pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya baik aktivitas operasi, hutang, infrastruktur maupun pembangunan lainnya yang bertujuan memenuhi pelayanan kepada masyarakat sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Jones dan Walker (2007) dalam Syurmita (2014) *financial distress* pada sektor pemerintahan pemerintah merupakan ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang ditetapkan. Bagi pemerintah daerah, *financial distress* ditandai oleh pengeluaran operasional yang tidak terkendali, sehingga mereka berusaha mengurangi pengeluaran untuk belanja modal dan investasi (Sunardi & Murwaningsari, 2021). Kesulitan keuangan juga bisa disebut sebagai kesulitan ekonomi, tekanan ekonomi atau tekanan keuangan (Assari, 2019). Tekanan keuangan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk meningkatnya kompleksitas dan ketidakpastian lingkungan keuangan (Steccolini *et al.*, 2018), serta ketidakstabilan sosial dan ekonomi, efektivitas penganggaran pendapatan, dan perubahan dalam perekonomian dan masyarakat (Gregori & Marattin, 2019).

Fenomena yang sering kali terjadi berkaitan dengan *financial distress* umumnya terjadi dikarenakan kurangnya pemerintah daerah dalam mengalokasi belanja modal. Kondisi ini mengakibatkan

ketidakmampuan daerah tersebut untuk melakukan investasi secara efektif pada keseluruhan aspek pemerintahan dalam upaya memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat. Selama tahun 2019-2021 di pemerintahan daerah Sumatera Barat terjadi penurunan yang konsisten, dengan penurunan rata-rata sebesar 12,67% setiap tahunnya. Berikut ini data yang peneliti rangkum dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan:

Tabel 1
Realisasi Belanja Modal Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2021

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
1	Kab. Kepulauan Mentawai	30,15%	17,28%	19,85%
2	Kab.Solok Selatan	24,25%	14,55%	15,38%
3	Kota Bukittinggi	26,22%	31,30%	14,31%
4	Kota Pariaman	22,23%	14,64%	11,37%
5	Kab. Dharmasraya	21,86%	19,73%	18,13%
6	Kab.Pasaman Barat	21,87%	16,30%	13,47%
7	Kab Sijunjung	20,41%	15,42%	14,61%
8	Kota Payakumbuh	22,61%	17,07%	16,25%
9	Kab Pesisir Selatan	19,18%	16,22%	13,74%
10	Kab Padang Pariaman	18,22%	13,57%	14,20%
11	Kota Padang	20,88%	14,24%	13,47%
12	Kab Agam	18,63%	9,98%	10,41%
13	Kab Lima Puluh Kota	18,57%	12,55%	11,66%
14	Kota Solok	18,81%	6,44%	15,66%
15	Kab Tanah Datar	15,02%	9,09%	11,80%
16	Kab Solok	15,61%	9,76%	11,68%
17	Kota Sawahlunto	15,16%	11,70%	14,29%
18	Kota Padang Panjang	16,36%	10,04%	10,46%
19	Kab Pasaman	12,44%	12,46%	10,53%

Sumber: Data Sekunder DJPK Kementerian Keuangan RI

Berdasarkan tabel diatas di tahun 2019 hanya Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan porsi belanja modal terhadap total belanja

mencapai di atas 30 persen dan Kota Bukittinggi tahun 2020 sedangkan, pada tahun 2021 tidak ada satupun kabupaten/kota yang mencapai porsi belanja modal diatas 30%. Rata-rata kontribusi belanja modal Provinsi Sumatera barat masih tergolong rendah. Angka ini masih dibawah standar yang telah ditetapkan pemerintah dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2022, yang mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal infrastruktur publik minimal 40% dari total APBD. Dalam hal ini terlihat bahwa pemerintah daerah masih banyak alokasi belanja modalnya belum mencapai standar minimal yang sudah ditetapkan yang menandakan masih rendahnya investasi yang dilakukan pemerintah daerah dan kondisi ini menggambarkan adanya risiko *financial distress*.

Financial distress pada pemerintahan daerah bisa menjadi faktor penilaian untuk mengevaluasi kinerjanya dalam mengelolah keuangan dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik demi kesejahteraan masyarakat. Kinerja pemerintah daerah tersebut bisa dilihat melalui laporan keuangan masing-masing daerah. Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan banyaknya faktor atau indikator yang mempengaruhi *financial distress* pemerintah daerah. Salah satunya penelitian Jones & Walker (2007) seperti yang dikutip oleh Syurmita (2014) menggunakan dua indikator untuk memprediksi terjadinya *financial distress* negara bagian di Australia, yaitu indikator keuangan dan non-keuangan. Indikator keuangan terdiri dari besaran dana yang dialokasikan untuk membangun infrastruktur pelayanan publik dan rasio-rasio kinerja keuangan,

sedangkan indikator non-keuangan terdiri dari karakteristik dewan dan kualitas pelayanan publik (Syurmita, 2014). Dalam penelitian ini menggunakan faktor keuangan untuk memprediksi terjadinya *financial distress* yang dilihat dari tingkat kemandirian keuangan dan *level of capital outlay*.

Kemandirian keuangan berpengaruh terhadap *financial distress* sebab kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu keuntungan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program kerja yang berasal dari daerah tersebut sehingga berdampak pada kesulitan keuangan (Mahayani & Gayatri, 2017). Tingkat kemandirian keuangan suatu daerah menunjukkan sejauh mana daerah tersebut bergantung pada sumber dana atau data eksternal, terutama dari pemerintah pusat dan provinsi. Semakin rendah ketergantungan daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat, semakin tinggi kemandirian keuangan daerah tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi ketergantungan daerah pada dukungan keuangan pemerintah pusat, semakin rendah kemandirian keuangannya (Pranoto *et al.*, 2022). Kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhannya melalui peningkatan pengeluaran modal berhubungan langsung dengan tingkat kemandirian keuangannya. Hal ini memungkinkan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang lebih baik. Oleh karena itu, dibandingkan daerah dengan kemandirian keuangan yang rendah, wilayah dengan kemandirian

keuangan yang kuat seringkali mempunyai kemungkinan mengalami *financial distress* yang lebih kecil (Illahi *et al.*, 2021).

Level of capital outlay adalah rasio yang digunakan untuk mengevaluasi efektifitas pengelolaan keuangan daerah, dengan membandingkan pengeluaran daerah dengan pendapatan asli daerah. Sutaryo (2010) dalam penelitian Mahayani & Gayatri (2017) menggunakan menggunakan LCO untuk memprediksi *financial distress*. Pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan meskipun Pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya. Jika rasio *level of capital outlay* baik, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah yang dihasilkan lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan rasio tersebut. Hal ini dapat membantu daerah terhindar dari *financial distress* dan sebaliknya (Rahmatika & Imron 2022). Semakin besar rasio LCO, maka semakin tidak efisien kinerja pemerintah karena pengeluaran melebihi kemampuan daerah untuk membiayainya. Oleh karena itu, kemungkinan pemerintah daerah menghadapi *financial distress* meningkat

seiring dengan meningkatnya rasio LCO. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki jumlah pengeluaran modal yang tinggi dibandingkan dengan pendapatan operasional atau total pendapatan daerah (Mahayani & Gayatri, 2017).

Penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *financial distress* pada pemerintah daerah dapat dijelaskan dengan teori ketergantungan sumber daya. Teori ketegantungan sumber daya yang dikemukakan oleh Emerson (1961) dalam (Mahayani & Gayatri, 2017) menjelaskan bahwa hubungan antara konsep kekuasaan dengan konsep ketergantungan dalam suatu organisasi. Ketergantungan merupakan bagian utama dari kekuasaan, dimana organisasi yang memiliki kekuasaan, yang berkaitan dengan lingkungan sekitar terkait dengan tugas dan wewenang organisasi tersebut. Dalam konteks *financial distress*, jika pemerintah daerah sangat bergantung pada satu sumber daya tertentu, seperti dana transfer dari pemerintah pusat, maka mereka mungkin lebih rentan terhadap perubahan dalam alokasi atau pemangkasan anggaran yang dapat terjadi dalam kondisi ekonomi yang sulit. Jika pemerintah daerah tidak memiliki diversifikasi sumber daya atau ketergantungannya terlalu tinggi pada satu sumber daya, mereka dapat mengalami kesulitan finansial ketika sumber daya tersebut terganggu atau berkurang.

Penelitian terdahulu tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap *financial distress* yang dilakukan Syurmita (2014) ditemukan bahwa kemandirian keuangan memiliki arah negatif signifikan

terhadap kondisi *financial distress*. Mahayani & Gayatri (2017) menemukan bahwa kemandirian keuangan dan *level of capital outlay* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Husniati *et al.* (2016) yang membuktikan bahwa kemandirian keuangan dan *level of capital outlay* tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *financial distress*. Dalam penelitian Rahmatika & Imron (2022) menemukan bahwa kemandirian keuangan dan *level of capital outlay* berpengaruh terhadap *financial distress*. Namun hasil dari penelitian Windiyanti & Isfaatun (2019) menemukan bahwa kemandirian keuangan tidak berpengaruh terhadap *financial distress* dan pada penelitian Atmaja (2012) menemukan bahwa rasio *level of capital outlay* berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Syurmita (2014) dan Mahayani & Gayatri (2017). Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu, masih terdapat banyak perbedaan hasil diantara para peneliti, dan sebagian besar peneliti lebih fokus pada pemerintahan daerah secara umum. Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen *financial distress* yang diukur dengan kapasitas fiskal atau dari segi pertumbuhan pendapatan asli daerah. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan periode waktu yang lebih panjang dan baru yaitu 2019-2023. Melihat topik *financial distress* banyak dilakukan pada perusahaan publik/swasta. Penelitian ini penting di

lakukan karena pada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat masih banyak menggunakan anggaran untuk belanja pegawai daripada belanja modal, dapat memungkinkan pemerintah daerah akan mengalami kondisi *financial distress*. Sehingga dalam jangka 5 tahun pemerintah daerah memerlukan langkah strategis sebagai upaya pengendalian terhadap kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal sebesar 30% sedangkan batas minimal belanja modal minimal sebesar 40% untuk menyesuaikan porsi belanja daerah pada UU HKPD. Kebijakan ini menjadi komitmen pemerintah agar memberi porsi belanja daerah yg lebih besar dan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya *financial distress*, khususnya dilihat dari indikator keuangan yaitu tingkat kemandirian daerah dan *level of capital outlay* di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian mengenai “**Pengaruh Kemandirian Daerah dan *Level of Capital Outlay* Terhadap *Financial Distress* Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Periode 2019-2023**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah kemandirian daerah berpengaruh terhadap *financial distress* pada pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat Periode 2019-2023?
2. Apakah *level of capital outlay* berpengaruh terhadap *financial distress* pada pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat Periode 2019-2023?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kemandirian daerah terhadap *financial distress* pada pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat Periode 2019-2023.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *level of capital outlay* terhadap *financial distress* pada pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat Periode 2019-2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh kemandirian daerah dan *level of capital outlay* terhadap *financial distress* pada pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat Periode 2019-2023.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau pertimbangan bagi pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pembaca terkait dengan pengaruh kemandirian daerah dan *level of capital outlay* terhadap *financial distress* pada pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat Periode 2019-2023 serta dapat menjadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi konseptual bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik pada kajian *financial distress* dan dapat berkontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang telah peneliti lakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Kemandirian keuangan memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan mampu memprediksi *financial distress* pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
2. LCO memberikan kontribusi positif dan signifikan *financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa LCO keuangan mampu memprediksi *financial distress* pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, memberikan bukti bahwa kemandirian keuangan dan LCO mempunyai relevansi dalam memprediksi status *financial distress* pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Keberadaan dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah Sumatera Barat untuk melakukan upaya untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pembangunan infrastruktur lebih baik dan melakukan alokasi dana serta pengelolaan dana publik dengan tepat sehingga membentuk efektifitas dan efisiensi sebagai bentuk upaya

yang dapat dilakukan untuk menghindari *financial distress* pada sektor publik.

Bagi masyarakat luas, diharapkan keberadaan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu informasi untuk mengawasi keuangan dan pelaksanaan kinerja dari pemerintah daerah masing-masing kabupaten dan kota di Sumatera Barat, sehingga kinerja pemerintah nantinya selalu berada dalam ranah perhatian dan pengawasan masyarakat menuju lebih baik lagi.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menggunakan indikator keuangan sebagai variabel independen dalam penelitian tanpa variabel non keuangan.
2. Penelitian ini hanya mengambil sampel kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat sehingga penelitian selanjutnya diharapkan bisa mengambil sampel yang lebih luas.
3. Ukuran penentuan kategori *financial distress* dalam penelitian ini hanya sebatas pada data kuantitatif saja dengan fokus pada perbandingan masing-masing belanja pemerintah daerah.

D. Saran

Berdasarkan pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Daerah Sumatera Barat

Melakukan upaya yang dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang dapat digunakan untuk pelayanan publik.

2. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat

Berupaya dengan mengalokasikan belanja daerah dengan tepat salah satunya dengan mengurangi belanja pegawai dan mengalokasikannya ke belanja modal. Serta meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah, kontribusi PAD dalam penerimaan daerah dan bagaimana memprioritaskan alokasi dananya untuk belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Sehingga pembangunan infrastruktur bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Untuk Penelitian Berikutnya

Penelitian ini hanya menggunakan tahun pengamatan selama 5 periode, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah tahun periode pengamatan untuk memperoleh prediksi yang lebih efisien selain itu diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel penelitian lain seperti indikator non keuangan sebagai variabel independen. Beberapa contoh indikator non keuangan tersebut adalah good governance, kondisi wilayah, jumlah penduduk, pemekaran wilayah dan umur daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Assari, S. (2019). Race, depression, and financial distress in a nationally representative sample of American adults. *Brain Sciences*, 9(2).
- Atmaja, K. F. (2012). Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Kemungkinan Terjadinya Financial Distress. *Accounting Analysis Journal*, 1(2), 1–7.
- Diwanti, N. S., & Purwanto. (2020). the Influence of Financial Ratios and Good Corporate Governance Towards Financial Distress on Islamic Banks in Indonesia. *FIRM Journal of Management Studies*, 5(1), 1.
- Elfiyana, E., & Arza, F. I. (2022). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Faktor Keuangan terhadap Kondisi Financial Distress di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(2), 425–437.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119-136.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gregori, W. D., & Marattin, L. (2019). Determinants of fiscal distress in Italian municipalities. *Empirical Economics*, 56(4), 1269–1281.
- Husniati, S., Fitriasuri, & Wahasusmiah, R. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Financial Distress Abstract This study aims to predicted financial distress at the provincial government in Indonesia . Where , in the public sector is defined as the inability of the government to provide public services a. *Nasional Global Competitive Advantage*, 3(1), 149–158.
- Hutabarat, F. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*. Banten: Desanta Multiavisitama.
- Illahi, F., Haryati, R., & Silvera, D. L. (2021). he Effect Of Financial Independence, Degree Of Decentralization And Shopping Harmony In Predicting The Status Of Financial Distress Of Regency And City Governments In West Sumatra Province 2015-2017. *Pareso Jurnal*, 3(3), 543–556.
- Kuncoro, M. (2011). *Metode Kuantitatif*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen: YPKN.
- Mahayani, & Gayatri. (2017). *Jumlah Penduduk Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kemandirian Keuangan Dan Level Of Capital Outlay Terhadap Financial Distress Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), B.*

19, 452–478.

Patunrui, K. I. A., & Yati, S. (2017). Analisis Penilaian Financial Distress Menggunakan Model Altman (Z-Score) Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 5(1), 55.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2019. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Pinasti, D., & Poerwati, R. T. (2022). Pengaruh Rasio Efisiensi, Kemandirian Keuangan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Financial Distress (Studi Empiris Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 984–990.

Pranoto, F. C., Hasthoro, H. A., & Nurwiyanta. (2022). Determinan Financial Distress Pemerintah Daerah. *Seminar Nasional Hasil Riset*, 7–14.

Rahmatika, N. A., & Imron, M. (2022). Pengaruh Kemandirian Daerah, Solvabilitas, Level of Capital Outlay Terhadap Financial Distress Pada Saat Pandemi COVID-19 Melalui Jumlah Penduduk Sebagai Pemoderasi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Tahun 2019-2022. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 437–444.

Sartika, D. (2016). *Analisis Prediksi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Periode 2011-2013*. 8(1), 165–175.

Sekaran, U. (2009). *Research Methods for business Buku II (IV)*. Salemba empat.

Steccolini, I., Korac, S., Saliterer, I., Barbera, C., & Jones, M. (2018). Local government financial resilience: Germany, Italy and UK compared. *CIMA Global Academic Research Programme*, 14(2).

Sunardi, S., & Murwaningsari, E. (2021). Prediksi Relevansi Nilai Informasi Akuntansi Terhadap Financial Distress Dimoderasi Capital Intensity Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera. *Akuntabilitas*, 15(2), 205–222.

Syurmita. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Prediksi Financial Distress. *Konferensi Regional Akuntansi (KRA)*, 1–28.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2014. *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2022. *Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*

Wicaksono, A. (2015). *Financial Distress pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia*. e-journal digilib UNS. Tesis.

Windiyanti, R., & Isfaatun, E. (2019). The Influence of Financial Independence, Solvency Ratio, Complexity, and Age of Government on the Financial Distress of District/City Governments in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(1), 49–60.

Wulandari, I., Nugraeni, N., & Wafa, Z. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Financial Distress Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(2), 100.

<https://djpk.kemenkeu.go.id/>

https://padek.jawapos.com/sumbar/2363757241/potret-buram-belanja_pegawai-kabupaten-dan-kota-sesumatera-barat